

**PROBLEMATIKA HUKUM RUMAH BANTUAN KHUSUS NELAYAN  
TANPA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA (STUDI KASUS DESA KETON KECAMATAN LINGGA  
TIMUR)**

**Oleh  
Ayu Wulandari  
NIM. 2105040091**

**Abstrak**

Rumah bantuan khusus nelayan merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan hukum, khususnya terkait tidak adanya sertifikat kepemilikan atas rumah bantuan tersebut. Permasalahan ini terjadi di Desa Keton, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, di mana rumah bantuan khusus nelayan telah dihuni sejak tahun 2020 tanpa kejelasan status kepemilikan secara yuridis. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan rumah bantuan khusus nelayan ditinjau dari perspektif hukum perdata serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan hukum kepemilikan rumah bantuan tanpa sertifikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan nelayan penerima bantuan, perangkat desa, serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan rumah bantuan oleh masyarakat nelayan hanya bersifat faktual dan belum didukung oleh kepemilikan yuridis yang sah karena belum dilaksanakannya proses sertifikasi dan pelepasan aset secara administratif. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap penerima bantuan menjadi lemah dan pemanfaatan rumah sebagai objek hukum perdata menjadi terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan langkah yuridis dan kebijakan yang berkesinambungan guna mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumah bantuan khusus bagi nelayan.

**Kata Kunci:** Problematika, Rumah Bantuan Khusus Nelayan, Sertifikat Kepemilikan, Hukum Perdata

**LEGAL ISSUES RELATED TO SPECIAL HOUSING ASSISTANCE FOR FISHERMEN WITHOUT CERTIFICATES OF OWNERSHIP FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE (CASE STUDY OF KETON VILLAGE, EAST LINGGA DISTRICT)**

**By**  
**Ayu Wulandari**  
**NIM. 2105040091**

***Abstract***

*The Special Housing Assistance for Fishermen is a government program aimed at improving the welfare of coastal communities. However, its implementation still encounters legal issues, particularly regarding the absence of ownership certificates for the assisted housing units. This issue occurs in Keton Village, East Lingga District, Lingga Regency, where the fishermen's housing units have been occupied since 2020 without clear juridical ownership status. Such conditions create legal uncertainty and potentially lead to civil disputes. This study aims to analyze the ownership status of the fishermen's special housing from a civil law perspective and to examine the efforts made by the community and the village government in resolving legal issues related to ownership of uncertified assisted housing. The research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through literature studies, field observations, and interviews with beneficiary fishermen, village officials, and relevant institutions. The findings indicate that the fishermen's possession of the housing units is merely factual and not yet supported by lawful juridical ownership, as the certification and administrative asset transfer processes have not been carried out. Consequently, the legal protection for beneficiaries remains weak, and the utilization of the houses as objects of civil law is limited. The study concludes that juridical measures and continuous policy efforts are required to realize legal certainty and protection of ownership rights over the fishermen's special housing assistance.*

*Keyword: Problems, Special Housing Assistance For Fishermen, Ownership Certificate, Civil Law*